



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terdiri atas beragam suku dengan ciri dan kekhasan budaya masing-masing. Keaneka-ragaman etnis yang dimiliki Indonesia, menjadi konsekuensi-konsekuensi tersendiri terhadap beberapa hal dalam kehidupan sosial, seperti stabilitas, harmoni sosial, dan persaingan identitas. Dengan keberagaman yang ada, hal tersebut membuat Indonesia menjadi rentan terhadap kemungkinan terjadinya berbagai sumber konflik. Tidak jarang konflik dipicu oleh perbedaan persepsi, makna, dan kepentingan diantara individu atau kelompok di dalamnya.

Menurut Leopold Von Weise dan Howard Becker dalam (Priatna & Iqbal, 2006, h. 48), menjelaskan konflik adalah suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Sehingga, dapat disimpulkan konflik terjadi karena adanya perbedaan pendapat, pertentangan, bahkan permusuhan.

Menurut Susan (2012, h. 4) masyarakat sesungguhnya disusun oleh relasi-relasi konflik. Namun, konflik menjadi kritis apabila konflik tersebut

berpengaruh pada sistem sosial dengan menciptakan ketidakamanan yang disertai praktik kekerasan.

Sepanjang sejarah, Indonesia merupakan negara yang tidak pernah kosong dari berbagai konflik salah satunya konflik kekerasan (Susan, 2012, H.19). Konflik dengan serangkaian kekerasan sudah ada sejak zaman pra-kolonial, hingga sekarang. Salah satu wilayah di Indonesia yang selalu menjadi perhatian mengenai konflik kekerasan, yaitu Papua. Papua kerap dilanda berbagai konflik kekerasan yang berkaitan dengan separatisme. Beberapa diantara konflik tersebut mengarah pada *dis-integrasi* dan telah menjadi masalah berkepanjangan tanpa penyelesaian yang tuntas hingga saat ini.

Konflik yang terjadi di Papua tidak hanya melibatkan antarsuku, melainkan warga sipil serta aparat keamanan. Alhasil tak jarang warga sipil maupun aparat keamanan menjadi korban dari konflik tersebut. Tercatat pada 2011-2014 telah terjadi beberapa konflik, diantaranya: (“Ada Pelanggaran HAM, Komnas HAM Menginvestigasi Penembakan di Paniai”, 2014, h. 23)

1. Pada 4 Januari 2011, Kinderman Gire, pendeta Sidang Gereja GIDI Toragi, Distrik Tinggi Nambut, Kabupaten Puncak Jaya, disiksa dan dibawa pergi rombongan TNI saat menunggu kendaraan pembawa bahan bakar yang dipesannya. Dua minggu kemudian kepalanya ditemukan di pinggir sungai.
2. Pada 15 Mei 2012, sejumlah anggota Brimob melakukan penembakan di sekitar wilayah penambangan emas di Degeuwo, Kampung Nomowaddie, Kabupaten Paniai. Penembakan terjadi saat anggota Brimob meleraikan keributan di sebuah rumah biliar.

3. Pada 1 Mei 2013, bentrokan terjadi antara warga dan aparat TNI/ Polri bertepatan dengan peringatan 50 tahun bergabungnya Papua ke Negara Kesatuan RI. Dalam insiden tersebut terjadi penembakan oleh aparat, dua warga diduga tewas.

Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi terjadinya konflik separatisme di Papua tidak hanya dapat dilihat dari kejadian lima atau sepuluh tahun kebelakang, karena konflik ini dimulai sejak 1960-an. Namun, terdapat dua sebab utama yang mendorong separatisme terus terjadi di Papua sejak 1960-an hingga sekarang ini, yaitu: (Anwar dkk, 2005, h. 258)

Kemunduran dalam kehidupan ekonomi, lemahnya kehidupan ekonomi masyarakat Papua menyebabkan masyarakat menyuarkan keluhan-keluhan mereka mengenai kebijakan pembangunan ekonomi yang dijalankan pemerintah pusat. Namun, kurangnya hubungan pemerintah pusat-daerah, menjadikan pemerintah pusat terkesan gagal dalam membangun kesejahteraan Papua.

Sebagai provinsi terluas dan terkaya dari sisi sumber daya alam (mineral, kayu, dan gas alam), walaupun demikian Papua tercatat memiliki daftar kasus kelaparan dan busung lapar di beberapa daerah, dan pendidikan rendah sebagai sebab akibat faktor kemiskinan. Jumlah kekayaan yang tidak seimbang dengan kesejahteraan masyarakat Papua. (*“Ekspedisi Tanah Papua”*, 2007, h. 234).

Kebijakan Pemerintah, terdapat beberapa aspek kebijakan pemerintah dalam keamanan yang menurut masyarakat hal tersebut bertentangan dengan niat pemerintah untuk membangun Papua. Dalam politik misalnya, masyarakat Papua

merasa beberapa aspirasi mereka tidak direspon secara adil oleh pemerintah. Sebaliknya pemerintah memobilisasi aparat keamanan dan menciptakan politik represif (menekan) secara mental maupun fisik melalui kekerasan terhadap masyarakat yang melakukan protes. Dampaknya yaitu kerusakan infrastruktur sosial, jatuhnya korban luka-luka bahkan korban jiwa. Hal tersebut berakibat pada rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah dalam melindungi dan men-sejahterakan masyarakat Papua.

Pada akhir 2014, tepatnya bulan Desember, Papua kembali menjadi sorotan. Terjadi konflik kekerasan disertai penembakan yang melibatkan aparat keamanan dengan warga sipil di Kabupaten Paniai, Papua. Mengakibatkan lima warga sipil tewas. Peristiwa ini menjadi sorotan serta perhatian karena tepat terjadi di masa-masa awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Peristiwa ini menjadi agenda tersendiri bagi Jokowi bagaimana mencari jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan beberapa konflik yang terjadi di Papua dan membangun tanah Papua damai.

Dari hasil penyelidikan, terjadi kesimpangsiuran informasi mengenai kronologi terjadinya penembakan dalam kasus Paniai. Terdapat penjelasan berbeda antara dua pihak yang harus ditelaah dengan cermat, diantaranya: (“Pendekatan Keamanan Papua Dikaji Ulang”, 2014, h. 2)

Penjelasan warga sipil, ia memaparkan ketika masyarakat berkumpul di lapangan sepak bola Karel Gobay terlihat enam atau tujuh aparat keamanan memegang senapan mengejar masyarakat yang berunjuk rasa. Tidak lama, terdengarlah suara tembakan dan melihat aparat keamanan memegang senapan.

Tidak tahu pasti asal tembakan dari mana, warga menduga beberapa tembakan keluar dari polsek atau koramil, tidak jauh dari tempat warga menggelar tarian waita. (“Pendekatan Keamanan Papua Dikaji Ulang”, 2014, h. 2)

Penjelasan lain didapat dari pemerintah. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Kemanan, Tedjo Edhy Purdijatno menuturkan, aparat sudah memberi peringatan kepada warga yang berunjuk rasa namun, terdapat sekelompok warga yang melawan sehingga aparat mengeluarkan tembakan peringatan. Aparat pun kaget dengan adanya korban, mereka menyatakan tidak tahu siapa yang menembak warga. (“Pendekatan Keamanan Papua Dikaji Ulang”, 2014, h. 2)

Belum ditemukan bukti-bukti kuat di lapangan, namun saksi mata memunculkan dugaan tembakan yang menewaskan lima warga sipil tersebut mengarah kepada pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI). Selanjutnya, pihak kepolisian masih melakukan investigasi atas kejadian penembakan. Meski begitu, bukti lain juga dinyatakan oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jendral Gatot Nurmantyo menyebutkan, asal tembakan tidak hanya berasal dari arah polsek atau koramil yang tengah disambangi pengunjuk rasa, menurutnya saat insiden itu terjadi terdengar juga tembakan dari atas bukit. Gatot juga menegaskan, saat itu tidak ada personel TNI dan Polri di atas bukit, dan mengaitkan peristiwa itu dengan peringatan HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang jatuh pada 1 Desember 2014 lalu. (“Tembakan Dari Gunung”, 2014, H. 2).

Organisasi Papua Merdeka (OPM) sering kali dikaitkan dengan konflik yang terjadi di Papua. Sejak dibentuk pada 1965, masalah OPM merupakan “duri

dalam daging” bagi pemerintah Indonesia dan bagi tekadnya untuk menjaga kesatuan Indonesia. Masalah itu adalah warisan sejarah, cara pemerintah membangun Papua, dan faktor-faktor dari luar yang mempengaruhi rakyat Papua, Anwar dkk, (2005, h. 267). Namun, hingga kini belum ada konfirmasi terkait dengan siapa pelaku atau tersangka dalam kasus tersebut.

Menurut Peneliti di Human Rights Watch dan pendiri Yayasan Pantau sekaligus secara intensif mengikuti perkembangan isu konflik di Papua, Andreas Harsono dalam “Tidak Ada Jurnalisme Independen di Papua” (2014, para. 12-13) mengatakan tidak mengherankan bila informasi simpang siur di Papua. Kesimpangsiuran yang terjadi karena ketiadaan jurnalisme yang independen, baik media lokal, nasional, maupun internasional. Rasa takut membuat wartawan lokal enggan untuk melakukan verifikasi. Media nasional pun terlihat mengambil langkah berhati-hati dalam menulis pemberitaan konflik di Papua, khususnya konflik penembakan di Paniai.

Terbatasnya ruang bagi wartawan untuk melakukan verifikasi terhadap berita di Papua sangat dibatasi dan diawasi. Andreas Harsono menjelaskan bagaimana sulitnya akses wartawan asing masuk ke Papua. Ia mengatakan tidak tahu mengapa Papua masih dibatasi. Misalnya saja seperti koresponden *Australian Associated Press* melamar hingga 12 kali dalam dua tahun namun tidak juga mendapatkan visa untuk ke Papua. Sedangkan Al Jazeera perlu enam tahun untuk dapat visa ke Papua. Sulitnya akses membuat Thomas Dandois dan Valentine Bourrat, dua wartawan Perancis dari TV Arte, mengambil langkah

menggunakan visa turis karena melamar visa wartawan dipersulit. (“Tidak Ada Jurnalisme Independen di Papua”, 2014, para. 19)

Pada Desember 2013, Human Rights Watch bersama tiga organisasi lain (Asia Justice and Rights, KontraS, serta Lembaga penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum) menulis surat kepada Wakil Presiden Boediono, meminta penjelasan mengapa pembatasan masih dijalankan. Namun, mereka tidak mendapatkan jawaban. (“Tidak Ada Jurnalisme Independen di Papua”, 2014, para. 21)

Menanggapi konflik penembakan di Paniai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan akan mencari jalan keluar terbaik yaitu melakukan dialog dengan masyarakat sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan di Papua. Melalui dialog damai yang akan dilakukan oleh Jokowi, hal tersebut diharapkan dapat memperbaiki hubungan pusat-daerah (Papua). Dengan begitu, tidak adalagi kecurigaan terselubung antara pusat-daerah (Papua). (“Jokowi Janjikan Dialog di Papua”, 2014, h. 2)

Penegakan kemanusiaan merupakan agenda penting yang harus diperhatikan pemerintahan Jokowi untuk menyembuhkan luka historis masyarakat Papua. Sudah saatnya pemerintah negeri ini peka dan mendengarkan aspirasi para korban konflik yang ada di Papua. Kekerasan, rasialisme, dan kemiskinan masyarakat Papua sangat membutuhkan perhatian yang serius. Rekonsiliasi bertujuan mengadili para pelaku kekerasan dan ketidak-adilan masyarakat Papua, serta mencari jalan solutif pembangunan masyarakat Papua di tanah mereka sendiri. (“Jokowi Janjikan Dialog di Papua”, 2014, h. 2)

Selain itu, media massa (cetak maupun *online*) memiliki peranan cukup penting dalam konflik penembakan di Paniai, Papua. Media massa dengan beragam pemberitaannya menjadi dua sisi seperti mata uang. Satu sisi media memberikan informasi kepada masyarakat mengenai apa yang terjadi di Paniai, Papua. Tetapi pemberitaan yang disampaikan pun tidak terlepas dari pembentukan opini masyarakat terhadap pemberitaan yang disampaikan oleh media tersebut. Hal itu tidak terlepas dari unsur nilai, kepentingan, dan kekuatan atau kekuasaan apa yang ada dalam media tersebut.

Adanya beragam kepentingan dalam media massa merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Media massa saat ini memiliki berbagai kepentingan politik dan ekonomi. Adanya kepentingan tersebut turut mempengaruhi berita yang disampaikan kepada khalayak, dimana media mengkonstruksi informasi yang didapat, dengan menonjolkan sudut pandang tertentu.

Menurut Eriyanto (2002, h. 27) berita adalah produk produk dari konstruksi dan pemaknaan atas realitas. Media baik cetak maupun online berperan mendefinisikan bagaimana realitas seharusnya dipahami dan dijelaskan secara tertentu kepada masyarakat. Pemaknaan seseorang atas suatu realitas berbeda pada setiap orang, yang tentunya menghasilkan “realitas” yang berbeda pula. Artinya khalayak sebagai pembaca disini tidak bersifat pasif. Pembaca bersifat aktif dalam menafsirkan apa yang dibaca, makna apa yang dipahami dalam sebuah pesan yang disampaikan melalui teks berita oleh suatu media.

Dalam konflik kekerasan di Paniai media massa terus berlomba-lomba memberitakan perkembangan konflik tersebut, terutama kontribusi media online.

Tidak hanya cetak, media online juga mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias, dan pemihakannya.

Media online adalah agen komunikasi yang sangat membantu penyebaran informasi kepada masyarakat. Sifat media online yang mudah diakses membuat siapa saja dapat menggunakan dengan layanan internet.

Pemberitaan mengenai konflik kekerasan di Paniai pun memiliki nilai berita, selain dapat dilihat dari segi korban jiwa, dari segi akibat, konflik ini berdampak besar bagi kelangsungan integrasi bangsa Indonesia dibalik desakan papua yang ingin memisahkan diri dari Indonesia.

Oleh sebab itu, untuk melihat konstruksi pemberitaan dalam media online mengenai konflik kekerasan di Paniai, perlu digunakan analisis *framing* sebagai metode untuk menganalisis isi media. *Framing* digunakan untuk menggambarkan proses penyelesaian dan penyorotan aspek-aspek khusus sebuah realita oleh media. Analisis ini akan mencermati strategi seleski, penonjolan, dan tautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menaik, lebih berarti atau lebih diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya.

Framing akan diaplikasikan dalam pemberitaan dua media online, yaitu *antarapapuanews.com* dan *majalahselangkah.com*. *Antarapapuanews.com* merupakan salah satu media *online* di Indonesia bentukan kantor berita resmi Republik Indonesia, LKBN ANTARA. Isi pemberitaan ANTARA lebih menitikberatkan pada pemberitaan yang utuh dan kredibel tentang pemerintahan dan nasionalisme.

Menurut peneliti di *Human Rights Watch* dan pendiri Yayasan Pantau sekaligus secara intensif mengikuti perkembangan isu konflik di Papua, Andreas Harsono, berdasarkan hasil wawancara peneliti, ia menyatakan *majalahselangkah.com* merupakan salah satu media online Papua yang terbilang independen dalam memberitakan suatu peristiwa.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti media online *antarapapuanews.com* dan *majalahselangkah.com*, periode Desember 2014 dengan judul **“Konstruksi Realitas Peristiwa Penembakan Warga Sipil di Paniai Oleh Antarapapua.com dan Majalahselangkah.com: Analisis Framing Robert N. Entman.”**

1.2 Rumusan Masalah

Dalam peristiwa penembakan di Paniai, Papua dapat dirumuskan dengan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana media online *antarapapuanews.com* dan *majalahselangkah.com* mengkonstruksi berita mengenai peristiwa penembakan terhadap warga sipil di Paniai?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan yaitu untuk mengetahui bagaimana media online *antarapapuanews.com* dan *majalahselangkah.com* mengkonstruksi berita mengenai peristiwa penembakan di Paniai?

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sumber pengetahuan mengenai konstruksi realitas terhadap peristiwa penembakan di Paniai yang dilakukan oleh media online.

1.4.2 Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat dalam memberikan pengetahuan mengenai suatu pemberitaan yang diberitakan oleh surat kabar harian *antarapapuanews.com* dan *majalahselangkah.com* dalam mengkonstruksi berita mengenai peristiwa penembakan di Paniai.

UMMN